

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SARANG BURUNG WALET
DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

FERY RINALDO

NIM 01061002068

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA
Tahun 2011**

9
352.135 07

Fer ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SARANG BURUNG WALET

a
2011

DI KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh:

FERY RINALDO

NIM 01061002068

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDRALAYA

Tahun 2011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FERY RINALDO
NIM : 01061002068
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SARANG
BURUNG WALET DI KOTA PALEMBANG

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 07 Januari 2011 Ketua

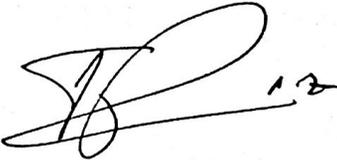
:



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP. 196805181993031003

Tanggal 07 Januari 2011 Anggota

:



Drs. Muhammad Teguh, M.Si
NIP. 196108081989031003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

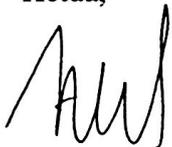
TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : FERY RINALDO
NIM : 01061002068
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SARANG
BURUNG WALET DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 02 Februari 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 02 Februari 2011

Ketua,



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP. 196805181993031003

Anggota,



Drs. Muhammad Teguh, M.Si
NIP. 196108081989031003

Anggota,



Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 196812241993031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 196812241993031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FERY RINALDO
Nim : 01061002068
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
ANALISIS PEMERIKSAAN PETRIBUSI SARANS BURUNG
WALET DI KOTA PALEMBANG

Pembimbing

Ketua : Dr. Azwardi, SE, Msi
Anggota : Drs Muhammad Teguh, Msi
Tanggal diuji : 2 Februari 2011

adalah benar-benar hasil karya saya dibawah binibingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar ke sarjanaan saya.

METERAI
TEMPEL

82310AAF209871657

ENAM RIBU RUPIAH
6000



Jenderalaya, 14 Februari 2011

g memberi pernyataan,



FERY RINALDO

NIM 01061002068

ABSTRAKSI

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SARANG BURUNG WALET DI KOTA PALEMBANG

Oleh :
Fery Rinaldo
Azwardi
Muhammad Teguh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data pendapatan perorangan yang diambil dari beberapa orang pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Palembang sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data penerimaan asli daerah (PAD) dan data volume bangunan penangkaran serta jumlah produksi sarang burung walet periode 2007-2009. Analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis peluang, uji homogenitas Chi-Square, dan uji Kruskal-Wallis.

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi penerimaan retribusi sarang burung walet masih kecil. Ini artinya peluang retribusi sarang burung walet di masa yang akan datang masih bisa dimaksimalkan. Penerimaan ini kecil disebabkan karena pemungut retribusi kesulitan dalam menginventaris obyek retribusi. Pemilik penangkaran sarang burung walet sulit ditemui atau tidak berdomisili di Kota Palembang, kemudian kurangnya kesadaran pemilik sarang burung walet dalam melaporkan volume bangunan penangkaran dan jumlah hasil produksi serta Pemerintah Daerah kurang mensosialisasikan Perda No 28 Tahun 2002 tentang pengusahaan sarang burung walet kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mendaftarkan izin operasional serta melaporkan produksi sarang burung. Perbedaan pendapatan diantara pengusaha sarang burung walet yang dipengaruhi oleh ketinggian bangunan penangkaran karena jumlah produksi sarang burung walet dipengaruhi oleh desain bangunan walet yang harus mempunyai dinding dan ketinggian 3 meter atau lebih karena burung walet tidak akan membuat sarang jika ketinggian kurang dari 3 meter.

Kata Kunci: Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF LOCAL REVENUES RECEIVED FROM THE SWALLOW NEST BUSINESS IN PALEMBANG CITY

By :
Fery Rinaldo
Azwardi
Muhammad Teguh

This research was aimed at analyzing the local revenues received from the swallow nest business in Palembang City. Primary and secondary data were collected for this research. The primary data were received from swallow nest farmers living in Palembang and the secondary data from documents of swallow nest local revenues, nesting farm volumes, swallow nest harvest in the period of 2007–2009. These data were analyzed in terms of variable contribution, their probability, Chi – square test and Kuskall – Wallis test.

The research result shows that the local revenues obtained from the swallow nest farming were low. Such low revenues were caused by an incomplete inventory of existing swallow nest farming units. This suggests that more revenues can be collected in the future. In addition, owners of the farming units were not available when information was needed, or they do not live in Palembang. These owners were reluctant or unaware of their responsibility to report their business as required by the local Government Regulation No. 28 Year 2002. They needed to report about their farming units. Differences in their incomes were due to their farming units; the swallows would nest in the units if these units were higher than three meters.

Keywords : Revenues, Swallow Nest

Motto

- Peliharalah antusiasisme karena antusiasisme memungkinkan kita menggapai impian setinggi bintang.
- Ketika Anda merasa sendiri, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anda.
- Jika kamu hanya sibuk memikirkan dirimu sendiri, itu adalah sikap yang berlebihan (Jane Ann Clarck).

Kupersembahkan kepada

- ✝ Tuhan Yesus Kristus
- ✝ Kedua orangtuaku
- ✝ Kedua adikku
- ✝ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada pembimbing atas semua bimbingan dan arahan yang telah diberikan untuk penulisan ini.

Penulisan skripsi ini mengambil judul “Analisis Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet Di Kota Palembang”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi serta untuk memperluas wawasan dan pemikiran tentang penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota Palembang.

Masih banyak sekali kelemahan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga nantinya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Penulis,

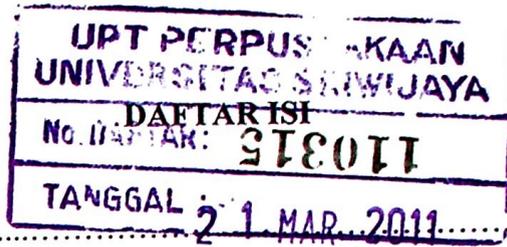
Fery Rinaldo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet Di Kota Palembang", sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Syamsurijal A.K, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak Drs. Nazeli Adnan, M.Si, Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
5. Bapak Drs.Fachrizal Bachri, M.Sc, Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Azwardi, M.Si, Pembimbing I Skripsi.
7. Bapak Drs.Muhammad Teguh, Pembimbing II Skripsi.
8. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tuaku dan adik-adikku (Fenika & Fera) yang telah memberikan dukungan moril.
10. Semua instansi di Palembang yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
11. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Teman-teman angkatan 2006 di Jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya Syaiful, Erik, Hendy, Helbi, Roni, Yalen, Diana. Terima kasih atas kebaikannya selama ini.



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TANDA UJIAN KOMPREHENSIF.....	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Peranan Pemerintah dalam Perekonomian	10
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.3. Retribusi Daerah	16
2.1.4. Retribusi Sarang Burung walet	25
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Konseptual Pemikiran	30
2.4. Hipotesis	31
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2. Sumber Data	31
3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	32

3.4. Metode Pengumpulan Data.....	32
3.5. Metode Analisis Data.....	35
3.5.1. Analisis Kontribusi	35
3.5.2. Analisis Peluang	36
3.5.3. Analisis Uji Statistik Non Parametrik.....	37
3.6. Batasan Operasional Variabel	38

BAB IV. DATA DAN PENELITIAN

4.1. Luas Wilayah dan Potensi Daerah	40
4.2. Kependudukan	41
4.3. Dasar Pengenaan Tarif Retribusi	44
4.4. Perkembangan Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet	45

BAB V. PEMBAHASAN

5.1. Kontribusi Retribusi Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Palembang	52
5.2. Faktor –Faktor Penyebab Naik Turunnya Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet	53
5.3. Peluang Retribusi Sarang Burung Walet di Kota Palembang.....	56
5.4. Uji Non Parametrik	58
5.4.1. Uji Homogenitas Chi-Square	58
5.4.2. Uji Kruskall-Wallis	58

BABVI. Kesimpulan dan Saran	59
6.1. Kesimpulan	59
6.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Retribusi Sarang Burung Walet di Kota Palembang Berdasarkan Realisasi dan Target Tahun 2007-2009	5
Tabel 4.1. Banyaknya Kelurahan/Desa per Kecamatan Di Kota Palembang Tahun 2003	41
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Palembang dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tahun 1998-2007	43
Tabel 4.4.1 Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet Tahun 2007-2009	46
Tabel 4.4.2. Persebaran Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet per Kecamatan Di Kota Palembang	48
Tabel 4.4.3. Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Operasional yang dihitung dari Volume Bangunan Tahun 2007-2009.....	49
Tabel 4.4.4. Realisasi Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet dari Retribusi Produksi yang dihitung dari Jumlah Produksi Tahun 2007-2009	50
Tabel 4.4.5. Daftar Responden Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Palembang	51
Tabel 5.1. Tingkat Kontribusi Retribusi Sarang Burung Walet terhadap PAD Kota Palembang Tahun 2007-2009	53
Tabel 5.3 Relisasi, Target dan Peluang Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet Tahun 2007-2009.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan yang dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai

dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah berhak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Penyelenggara pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam kewenangan daerah. Kewenangan daerah merupakan wewenang yang dimiliki pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan menjadi pemerintah pusat. Dalam UU tersebut kewenangan daerah terbagi menjadi kewenangan pemerintah daerah dan provinsi (pasal 13 UU No 32 Tahun 2004) dan kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota (pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004).

Pada UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan :

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintah yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah

Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows functions* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah.

Untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah, pemerintah daerah memperoleh pendanaan dari berbagai sumber. Sumber pendanaan tersebut antara lain dapat bersumber dari alokasi dari pemerintah pusat dan pendanaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan yang diperoleh dari pemerintah daerah antara lain adalah perpajakan dan investasi daerah.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Pendapatan asli daerah yang sah

Tabel 1.1
Persentase Retribusi Sarang Burung Walet di Kota Palembang
Berdasarkan Realisasi dan Target Tahun 2007-2009

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2007	Rp 346.125.000,00	Rp 168.203.600,00	48 %
2	2008	Rp 750.000.000,00	Rp 109.819.000,00	14,6 %
3	2009	Rp 843.525.000,00	Rp 151.595.400,00	17,97 %

Sumber : Dispenda Kota Palembang Tahun 2010 (data diolah)

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang di atas, dapat diketahui setiap tahun anggarannya mengalami perubahan, yaitu tahun 2007 hanya mencapai 48%, akan tetapi pada tahun 2008 mengalami penurunan yang signifikan yaitu hanya mencapai 14,6% dan pada tahun 2009 hanya mencapai 17,97%.

Pemerintah Daerah Kota Palembang pada tahun 2008 dan 2009 meningkatkan target penerimaan retribusi sarang burung walet terhadap PAD, hal ini dilakukan untuk meningkatkan PAD, dan dipergunakan untuk pembangunan. Akan tetapi dalam realisasinya target tidak tercapai, maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang dari retribusi sarang burung walet.

Selain itu berdasarkan Tabel 1.1. terjadi fluktuasi penerimaan daerah dari sarang burung walet selama kurun waktu 3 tahun. Penerimaan tertinggi terjadi di tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan. Hal ini dapat dimaklumi karena banyaknya jumlah pengusaha sarang burung walet yang belum didata oleh Dinas Pertanian Kota Palembang dan juga retribusi ini baru berjalan 3 tahun terakhir sehingga petugas Dinas Pertanian Kota

Palembang belum maksimal dalam mensosialisasikan kepada pengusaha sarang burung walet. Untuk itu Pemerintah Kota Palembang berusaha merevisi perda retribusi sarang burung walet menjadi perda pajak sarang burung walet pada tahun 2011 sehingga pajak sarang burung walet sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan sektor andalan penerimaan di sektor retribusi daerah. Retribusi sarang burung walet akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka untuk selanjutnya hanya retribusi daerah yang akan dibahas lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kapasitas retribusi daerah khususnya retribusi sarang burung walet.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pemungutannya harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Berdasarkan uraian di atas kajian tentang retribusi sarang burung walet secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi peluang penerimaan retribusi sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menariknya kajian ini setidaknya dilandasi oleh belum adanya penelitian retribusi sarang burung walet di Kota Palembang yang baru dipungut tiga tahun ini secara mendalam tentang peluang penerimaan retribusi sarang burung walet sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SARANG BURUNG WALET DI KOTA PALEMBANG ”**.

I.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan naik turunnya penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota Palembang.
2. Bagaimana peluang penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota Palembang di masa yang akan datang.
3. Apakah terdapat perbedaan pendapatan antara pengusaha penangkaran sarang burung walet.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan naik turunnya penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui peluang penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota Palembang di masa yang akan datang.
3. Untuk mengetahui adakah perbedaan pendapatan antara pengusaha penangkaran sarang burung walet.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis agar hasil penelitain ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat memperoleh informasi lebih mengenai retribusi sarang burung walet sebagai salah satu penerimaan daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Operasional

Manfaat ini dapat diperoleh bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait sebagai bahan pertimbangan dalam

melakukan kajian dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan guna meningkatkan penerimaan retribusi sarang burung walet sebagai salah satu penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyansyah, Indra Widhi. 2005. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo. *Skripsi*, UII, Yogyakarta (tidak dipublikasi).
- Asngari, Imam. 2007. *Modul Praktikum Statistik Non Parametrik*. Palembang: Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Badan Pusat Statitik Kota Palembang. 2007. *Kota Palembang Dalam Angka*. Palembang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. Palembang.
- Bantara, Febi. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Bea Balik Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya (tidak dipublikasi).
- Davey, Kenneth.J. 1988. *Financing Regional Government*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Delaney, Daniel. 2008. Budaya Sarang Burung Walet di Jawa Timur. *Skripsi*, Universitas Negeri Malang, Malang (tidak dipublikasi).
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang. 2009. *Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2007-2008*. Palembang : Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kota Palembang.2010. *Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi, Isi Bangunan, Persebaran, dan Jumlah Produksi Sarang Burung Walet Tahun 2007-2009*. Palembang : Dinas Pertanian

Dorojatun, Bagus. 2007 Sistem Penerimaan Pajak Sarang Burung Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal. *Tugas Akhir*, Universitas Negeri Semarang, Semarang (tidak dipublikasi).

Dumairy.1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kaho, J.Riwu. 1982. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Mangkoesobroto, Guritno.1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: UGM.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Munawir,H. S. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Musgrave, Richard. A. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nasution, Agus Salim. 1964. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandung: Penerbit Ganesha.

Peraturan Daerah Kota Palembang No 28 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat FE Unsri bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 2006 . *Laporan Akhir Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin*. Universitas Sriwijaya, Palembang: Unsri.

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.”

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*"

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*"

Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Makara, Sosial Humanira, Vol 7, No. 2, Desember 2003. Jakarta: UI.

Soedargo. 1992. *Retribusi dan Perpajakan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suparmoko, Muhammad. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.